

## Transformasi Akses World Trade Organization: Dari *Interface* ke Marketisasi dalam Integrasi *Non-Market Economies*

Revita Maghfira Shavira Putri

revita17001@mail.unpad.ac.id

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;

DOI: 10.33197/jpi.v2i1.1943

---

### Abstract

*This study examines the integration process of non-market economies (NMEs) into the World Trade Organization (WTO), focusing on the evolution of trade diplomacy approaches and the challenges arising from economic system disparities. Utilizing qualitative methods and literature review, this analysis highlights how the conflict between WTO's market economy assumptions and the planned economic practices of NMEs has led to the development of unique integration strategies. Through data triangulation for validation, the study reveals that the accession process of NMEs to the WTO has transformed from a neutral interface model to a "marketization" strategy emphasizing pro-market economic reforms as a condition for membership. Thematic analysis of policy documents, accession protocols, and related literature indicates a shift in ideology within the global trade regime, where the WTO plays a key role in facilitating the economic transition of NMEs towards market economies. These findings provide significant insights into the power dynamics in multilateral trade diplomacy and its implications for the uniformity of the global economic system.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji proses integrasi *non-market economies* (NMEs) ke dalam World Trade Organization (WTO), dengan fokus pada evolusi pendekatan diplomasi perdagangan dan tantangan yang muncul dari perbedaan sistem ekonomi. Menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka, analisis ini menyoroti bagaimana konflik antara asumsi ekonomi pasar WTO dan praktik ekonomi terencana negara-negara NME telah mengarah pada pengembangan strategi integrasi yang unik. Melalui pendekatan triangulasi data untuk validasi, studi ini mengungkapkan bahwa proses akses NME ke WTO telah bertransformasi dari model antarmuka yang netral menjadi strategi "marketisasi" yang menekankan reformasi ekonomi pro-pasar sebagai syarat keanggotaan. Analisis tematik dari dokumen kebijakan, protokol akses, dan literatur terkait menunjukkan pergeseran ideologi dalam rezim perdagangan global, dimana WTO memainkan peran kunci dalam memfasilitasi transisi ekonomi NME menuju ekonomi pasar. Temuan ini memberikan wawasan penting tentang dinamika kekuasaan dalam diplomasi perdagangan multilateral dan implikasinya terhadap keseragaman sistem ekonomi global.

### Keywords

*WTO Accession, Non-Market Economies, Trade Diplomacy, Marketization, Pro-Market Economic Reforms.*

### Article History

Received date April 4, 2024

Revised date April 29, 2024

Accepted date April 29, 2024

Published date April 30, 2024

### Corresponding Author

Jl. Hegarmanah, Jatindang,  
Sumedang Regency, West Java  
45363

---

## Pendahuluan

Di era globalisasi dan perdagangan internasional yang semakin dinamis, integrasi negara-negara dengan *non-market economies* (NMEs) ke dalam World Trade Organization (WTO) menimbulkan tantangan signifikan dan peluang baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pendekatan WTO dalam menangani ekonomi non-pasar dari sekadar menjadi antarmuka netral menuju strategi "marketisasi" yang mengharuskan reformasi ekonomi pro-pasar sebagai syarat keanggotaan. Proses ini mencerminkan pergeseran ideologi dalam rezim perdagangan global, di mana WTO tidak hanya bertindak sebagai pengatur dan fasilitator

perdagangan bebas, tetapi juga sebagai katalis transformasi ekonomi dari negara-negara NME menuju model ekonomi pasar.

Aturan perdagangan GATT/WTO didasarkan pada asumsi ekonomi pasar. Rezim ini mendorong pengurangan intervensi pemerintah dalam aktivitas perdagangan internasional dan bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dengan membatasi pemerintah nasional dari mengadopsi tindakan yang menghambat aliran perdagangan bebas. Sebaliknya, NMEs ditandai dengan monopoli negara atas perdagangan luar negeri dan pendekatan terencana terhadap semua aktivitas ekonomi. Dari sudut pandang ini, praktik NME telah menimbulkan konflik signifikan dengan prinsip-prinsip GATT/WTO.

Penelitian yang membahas mengenai transformasi akses pasar melalui WTO telah banyak dilakukan seperti oleh, Shaffer & Pabian (2015), Trujillo (2015), Liebman & Tomlin (2015), Boza & Fernández (2016), yang menyimpulkan bahwa reformasi aturan WTO untuk memungkinkan pembangunan cadangan pangan publik menyoroti kebutuhan adaptasi dan fleksibilitas dalam aturan WTO untuk mengatasi krisis global, yang sejalan dengan temuan Anda mengenai perluasan interpretasi dan adaptasi kebijakan dalam mengintegrasikan NMEs. Selain itu, penelitian oleh Theodorou (2017), Cowling et al., (2019), Solomon (2023), Baetens (2023), Hopewell & Margulis (2023), mengakui bahwa peran strategis WTO dalam mengatur dan merangsang prinsip-prinsip global yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini tentang proses integrasi NMEs ke dalam WTO dengan fokus pada pendekatan diplomasi perdagangan yang berkembang dan tantangan dari perbedaan sistem ekonomi memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berupaya mengkaji transformasi dari model antarmuka yang netral ke strategi “marketisasi” yang menekankan reformasi NME sebagai syarat keanggotaan WTO. Hal ini terkait erat dengan fokus penelitian Anda mengenai bagaimana konflik antara asumsi ekonomi pasar WTO dan praktik ekonomi terencana dari negara-negara NME telah mengarah pada pengembangan strategi integrasi yang unik. Atas dasar tersebut, penelitian ini memiliki pertanyaan berupa “Bagaimana WTO dapat mengintegrasikan negara-negara dengan NMEs sambil mempertahankan prinsip-prinsip pasar bebas yang menjadi fondasi organisasi tersebut?”

### **Diplomasi Perdagangan Multilateral terhadap *Non-Market Economies***

Permasalahan yang dihadirkan oleh NMEs terhadap sistem perdagangan global pada dasarnya muncul dari campur tangan pemerintah dalam aktivitas komersial, yang menyebabkan distorsi pasar dan mengikis norma serta prinsip yang umumnya diterapkan dalam ekonomi yang berorientasi pasar. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai apakah aturan-aturan umum GATT/WTO memiliki kemampuan untuk menangani NME. Masalah ini berawal dari era GATT.

Diplomasi perdagangan multilateral, yang merupakan inti dari kerjasama ekonomi internasional, merujuk pada negosiasi yang dilakukan antara tiga negara atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang mengatur aspek-aspek perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan adil, mengurangi hambatan perdagangan dengan menurunkan tarif dan mengeliminasi kuota, serta mengatasi isu-isu baru seperti standar lingkungan dan hak-hak pekerja. Dalam konteks ini, GATT/WTO memegang peran penting

dalam memfasilitasi dan mengatur diplomasi perdagangan multilateral, menyediakan sebuah forum untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa yang membantu mencegah konflik perdagangan dan mempromosikan stabilitas ekonomi global.

Terdapat dua pendekatan dalam menjelaskan diplomasi perdagangan multilateral selama era GATT. Pertama, prinsip *Interface* menekankan fungsi rezim internasional sebagai perantara antar negara dengan preferensi kebijakan ekonomi yang beragam. Mengingat GATT seharusnya bersikap netral terhadap pilihan desain ekonomi domestik dan hanya menyediakan forum negosiasi bagi negara-negara untuk mencari solusi atas perbedaan mereka, hal ini berarti bahwa NME tidak dibebani oleh kewajiban perdagangan internasional untuk mereformasi struktur ekonomi domestik mereka, selama terdapat kesepakatan tentang formula untuk mengadaptasi praktik perdagangan yang berbeda. Kedua, prinsip liberalisme memberikan wawasan mengenai kompleksitas diplomasi perdagangan. Teori ini menggambarkan GATT sebagai serangkaian kompromi kompleks yang dicapai di tingkat multilateral untuk memastikan keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan kebijakan sosial domestik yang beragam. Dari perspektif ini, pengaturan akses untuk NME tentunya memberikan ruang bagi negara-negara tersebut untuk menyesuaikan struktur ekonomi domestik mereka, tanpa intervensi dari Pihak Kontrak GATT lainnya.

#### *Interface Principle*

*Interface principle* dari GATT terutama telah dijelaskan oleh John Jackson (1989, 1990, 1997, 1995), mengenai penyesuaian NMEs dalam GATT dan bahkan gesekan sistem di antara anggota GATT yang menganut ekonomi pasar. Konsep ini didasarkan pada dua asumsi dari rezim GATT. Pertama, GATT dirancang untuk bersifat 'universal'. Jackson menelusuri sejarah International Trade Organization (ITO) dan menyimpulkan bahwa karena GATT harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kegagalan ITO, GATT juga telah mewarisi misi dasar untuk menampung semua jenis ekonomi. Sebagai sebuah forum universal untuk semua jenis ekonomi, Jackson menekankan bahwa bukanlah tujuan atau peran dari GATT untuk memberikan tekanan pada negara-negara berdaulat untuk menerima prinsip-prinsip ekonomi yang berorientasi pasar, karena struktur internal pasar suatu negara harus dibiarkan kepada penilaian negara tersebut sendiri. Asumsi kedua adalah sistem ekonomi yang berbeda akan selalu ada di dunia. Bahkan dalam kategori 'ekonomi pasar' yang sama, masih ada berbagai tingkat intervensi pemerintah dalam pasar (Jackson, 1990).

Seiring dengan meningkatnya ketergantungan ekonomi global, diplomasi perdagangan di antara berbagai sistem ekonomi juga menjadi lebih sulit. Jackson melihat masalah ini serupa dengan kesulitan yang terlibat dalam mencoba membuat dua komputer dengan desain yang berbeda untuk dapat bekerja sama, dengan solusinya adalah mekanisme "*interface*" yang memediasi antara kedua komputer tersebut (Jackson, 1997). Dalam hubungan perdagangan internasional, aturan-aturan GATT berfungsi sebagai *interface* seperti itu di antara negara-negara dengan sistem ekonomi yang berbeda. Rezim internasional hanya menyediakan aturan dan platform negosiasi untuk mengurangi ketidaksesuaian di antara struktur pasar anggotanya. GATT itu sendiri, meskipun didasarkan pada prinsip pasar, bersikap netral terhadap pilihan desain ekonomi domestik. Berkaitan dengan debat tentang cara mengintegrasikan negara-negara non-pasar ke dalam GATT, tujuannya harus

merancang satu set aturan *interface* di mana ekonomi terencana para negara NME dapat berdagang dengan ekonomi pasar GATT yang ada sejauh mungkin (Jackson, 1990).

Integrasi Polandia, Rumania, dan Hongaria ke dalam sistem GATT cocok sempurna dengan *interface principle*. Struktur ekonomi domestik mereka diterima apa adanya. Tujuan selama negosiasi adalah untuk mencapai konversi manfaat perdagangan yang memuaskan. Polandia dan Rumania mengalami kesulitan dalam menawarkan timbal balik untuk keuntungan yang dikaitkan dengan keanggotaan, karena sifat perdagangan luar negeri mereka yang dikelola negara. Namun, solusi untuk masalah ini bukanlah mengenakan sistem tarif seperti di ekonomi pasar. Sebaliknya, para negosiator mencari formula untuk mengonversi kuota impor menjadi manfaat perdagangan yang setara dengan konsesi tarif (Nedumpara & Zhou, 2018). Dalam kasus-kasus ini, GATT berfungsi sebagai *interface* antara dua negara. Pilihan sistem ekonomi diserahkan kepada Para Pihak yang memiliki kontrak dan GATT hanya menyediakan aturan yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan dan forum di mana anggota dapat melakukan negosiasi sekali terjadi sengketa.

### *Liberalisme Marketisasi*

Meskipun tidak secara spesifik menangani masalah NME, liberalisme adalah teori lain yang membantu dalam memahami pendekatan GATT terhadap NME. Teori ini, yang sangat identik dengan karya-karya John Ruggie, menunjukkan lebih jauh tentang kompleksitas diplomasi perdagangan, karena memahami GATT sebagai penggabungan serangkaian kompromi kompleks — yang dicapai melalui tawar-menawar multilateral — yang dirancang untuk mencapai keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan berbagai kebijakan sosial domestik (Ruggie, 1982).

Teori ini kurang fokus pada justifikasi ekonomi untuk GATT, seperti keuntungan komparatif atau keuntungan dari perdagangan bebas, daripada pada alasan-alasan politik domestiknya. Secara historis, Ruggie menyarankan bahwa prinsip-prinsip multilateralisme, pengurangan tarif, dan timbal balik ditegaskan selama negosiasi Bretton Woods (Ruggie, 1982). Namun, diplomat Bretton Woods tidak berkomitmen pada perdagangan bebas secara total (Howse, 2002). Sebaliknya, mereka memahami perlunya intervensi negara untuk meredakan gangguan yang mungkin dihasilkan oleh liberalisasi perdagangan (Dunoff, 1999). Oleh karena itu, tugas dari rekonstruksi institusi ekonomi internasional pasca-perang adalah untuk manuver antara dua konsep liberalisasi ekonomi dan stabilitas domestik, GATT dirancang untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya sambil sekaligus menawarkan berbagai pengecualian, perlindungan, dan pengecualian untuk melindungi kebijakan sosial domestik (Lang, 2006). Misalnya, meskipun pembatasan kuantitatif umumnya dilarang, mereka secara tegas diizinkan sebagai sarana perlindungan. Melalui serangkaian kompromi seperti itu, GATT disusun sedemikian rupa yang mencari keuntungan dari perdagangan namun secara bersamaan ‘berjanji untuk meminimalkan biaya penyesuaian domestik yang mengganggu secara sosial serta kerentanan ekonomi dan politik nasional’ yang dihasilkan dari pembagian kerja internasional (Ruggie, 1982).

Kompromi ‘liberal’ yang mendasari adalah bahwa sebagai imbalan untuk kebijakan perdagangan liberal, negara-negara GATT akan menyediakan berbagai jaring pengaman domestik. John Ruggie telah menamakan tawar-menawar ini sebagai kompromi liberalism (Ruggie, 1998). Bagi John Ruggie, esensi dari liberalisme adalah merancang bentuk multilateralisme yang

kompatibel dengan kebutuhan stabilitas domestik (Lang, 2006). Hal ini juga tercermin dalam pendekatan GATT terhadap NMEs, karena pengaturan akses menyediakan ruang bagi anggota baru untuk manuver kebijakan ekonomi domestik mereka. Desain untuk mengintegrasikan NME selama era GATT adalah tentang memastikan timbal balik dalam manfaat perdagangan dan menawarkan mekanisme pelarian darurat. Struktur ekonomi domestik negara-negara ini tidak tersentuh. Dilihat dari model liberalisme, negara-negara dengan ekonomi terencana diberikan keleluasaan yang luas atas struktur pasar domestik mereka, bebas dari campur tangan oleh Pihak Kontrak GATT lainnya. Diplomasi perdagangan multilateral pada periode awal GATT dengan demikian bukanlah sekadar cara untuk menciptakan satu model ekonomi (marketisasi) tetapi lebih tentang mengelola hubungan perdagangan di antara model ekonomi yang berbeda.

### **Metode**

Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis dan memahami dinamika kompleks antara ekonomi pasar dan non-pasar dalam kerangka kerja WTO. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami aspek historis, politis, dan sosial yang mempengaruhi integrasi NMEs ke dalam sistem perdagangan global. Melalui analisis teks yang mendalam, peneliti mencoba memahami bagaimana dan mengapa negara-negara ini berusaha memasuki WTO, serta dampak yang dihasilkan terhadap kebijakan domestik dan global. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, mencakup sejarah akses negara-negara NMEs ke WTO, teori diplomasi perdagangan multilateral, dan prinsip-prinsip GATT/WTO. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan validasi data menggunakan triangulasi data, termasuk publikasi akademis, laporan resmi WTO, dan literatur terkait lainnya untuk membangun argumen dan mendukung temuannya.

### **Partisipasi NMEs dalam GATT**

Pada awalnya, negara-negara dengan ekonomi terencana sentral, seperti Kuba dan Cekoslowakia, tidak terlibat secara aktif dalam GATT meskipun mereka adalah anggota pendirinya. Afiliasi mereka dengan blok sosialis, yang terbentuk setelah penandatanganan perjanjian GATT, menjadikan mereka mitra pasif yang tidak berpartisipasi dalam pengurangan tarif atau menuntut pemenuhan komitmen oleh anggota GATT lainnya. Pertanyaan tentang bagaimana mengatur hubungan perdagangan antara negara-negara Eropa Timur dan Barat muncul pada pertengahan tahun 1950-an, terutama ketika perdagangan antara kedua blok tersebut mulai meningkat. Masalah ini pertama kali dibahas oleh Cekoslowakia dalam konteks praktik anti-dumping, yang kemudian mengarah pada penambahan catatan interpretatif ke Artikel VI GATT (Brabant, 1991).

Akses Polandia ke GATT pada tahun 1967 dianggap sebagai momen penting, yang menandai masuknya ekonomi terencana pertama ke dalam sistem yang didasarkan pada prinsip pasar bebas. Mekanisme khusus dikembangkan untuk mengintegrasikan negara-negara dengan ekonomi terencana ini ke dalam GATT (Kostecki, 1979). Sikap negara NME terhadap sistem perdagangan multilateral berkembang sepanjang waktu. Mereka awalnya menolak tatanan perdagangan multilateral dan institusinya, namun, setelah periode isolasi, persepsi mereka secara bertahap berubah, terutama karena pertumbuhan perdagangan dengan negara-negara Eropa Barat dan keinginan untuk mengembangkan hubungan perdagangan dengan ekonomi pasar Barat. Ini

mendorong mereka untuk mengeksplorasi multilateralisme sebagai sarana untuk mengurangi kontrol ekspor dan diskriminasi terhadap produk mereka (Nedumpara & Zhou, 2018).

Pada pertengahan abad ke-20, Uni Soviet bahkan mengusulkan penciptaan ITO sebagai kerangka kerja baru untuk perdagangan internasional, tetapi usulan ini tidak mendapat banyak dukungan. Ketidakmampuan untuk membentuk organisasi perdagangan baru ini mendorong negara-negara non-pasar untuk akhirnya beralih ke GATT, menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan mereka terhadap sistem perdagangan multilateral pasca-perang mereka (Nedumpara & Zhou, 2018).

Pada era keanggotaan GATT di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, negara-negara NME seperti Polandia, Rumania, dan Hungaria bergabung dengan GATT tanpa meninggalkan sistem ekonomi terencana sentral mereka. Meskipun menghadapi reformasi, ekonomi negara-negara ini tetap jauh dari model ekonomi pasar seperti yang ada di Barat. GATT, yang pada awalnya didesain untuk ekonomi pasar, menemukan tantangan dalam mengintegrasikan negara-negara dengan sistem perdagangan negara yang ketat dan terencana. Dalam proses keanggotaan, GATT mengadopsi protokol keanggotaan khusus dan mekanisme seperti kuota impor dan pengamanan khusus untuk menjembatani perbedaan sistem ekonomi. Ini memungkinkan GATT mempertahankan prinsip-prinsip pasar sambil menerima karakteristik ekonomi terencana negara anggota baru (Kostecki, 1979).

Protokol keanggotaan GATT untuk negara-negara dengan sistem perdagangan negara, seperti Polandia, Rumania, dan Hungaria, tidak banyak mengubah aturan GATT yang sudah ada. Dalam hal prinsip resiprositas, protokol tersebut menyederhanakan konversi antara konsesi tarif dan kuota impor untuk Polandia dan Rumania, sedangkan untuk Hungaria, yang menerapkan sistem tarif baru yang sejalan dengan anggota GATT lainnya, tidak diperlukan pengaturan khusus. Satu-satunya mekanisme khusus yang digunakan adalah klausul pengamanan, yang memungkinkan anggota GATT mengambil tindakan perbaikan terhadap lonjakan ekspor dari negara-negara baru tersebut. Di luar pengecualian ini, tidak ada persyaratan khusus dalam protokol yang menangani karakteristik pasar terencana dari negara-negara baru yang bergabung.

Pada dasarnya, ketika negara-negara dengan sistem pasar terencana ini bergabung dengan GATT, tidak ada ekspektasi formal untuk mereka melakukan reformasi pasar. Walaupun ada harapan dari anggota GATT yang sudah ada bahwa kebijakan perdagangan negara-negara NME akan menjadi lebih berorientasi pasar, harapan tersebut tidak didukung oleh kewajiban hukum untuk melaksanakan liberalisasi ekonomi.

### **Akses NMEs ke WTO: Dari *Interface* ke Marketisasi**

Masuknya NME ke WTO terjadi dalam lingkungan politik internasional yang sangat berbeda dari masa GATT. Selama Perang Dingin, hubungan dagang formal antara ekonomi pasar dan blok Soviet sebagian besar ditentukan oleh pertimbangan politik dan strategis daripada kekhawatiran ekonomi. Berakhirnya Perang Dingin merupakan faktor penting dalam reintegrasi NMEs ke dalam perdagangan global dan perubahan dalam diplomasi perdagangan multilateral. Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur dan kemudian Uni Soviet, bipolaritas dalam politik dan ekonomi internasional juga berkurang. Tidak lagi ada dua sistem ekonomi yang bertentangan: kapitalis atau komunis; pasar atau terencana.

Bersama dengan jatuhnya partai-partai komunis, ekonomi-ekonomi yang sebelumnya terencana ini semua bergegas untuk mereformasi struktur ekonomi domestik mereka (Huang, 2009).

Negara-negara yang sedang mereformasi berusaha masuk ke sistem GATT/WTO tepat pada saat Putaran Uruguay negosiasi (dari 1987-1994) ketika negara-negara GATT yang ada berusaha untuk melampaui penekanan tradisional pada perdagangan barang ke integrasi ekonomi yang lebih dalam melibatkan perdagangan jasa, properti intelektual dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa. Kehadiran global yang meningkat dari korporasi multinasional dari negara-negara maju telah menghasilkan tuntutan untuk akses pasar di luar batas nasional. Karena tarif telah sangat dikurangi dalam putaran negosiasi GATT sebelumnya, konsep akses pasar kini diperluas ke investasi, jasa dan perlindungan properti intelektual, yang semuanya mencerminkan kepentingan komersial dari mitra dagang yang kuat seperti Amerika Serikat dan Eropa (Nedumpara & Zhou, 2018).

Proliferasi peraturan pembukaan pasar internasional dan perlindungan sewa teknologi menyebabkan penyusutan ruang kebijakan anggota WTO, khususnya negara-negara berkembang. Hasil akhir dari Putaran Uruguay menghasilkan organisasi perdagangan baru dengan cakupan isu baru — termasuk perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual terkait perdagangan — dan aturan lebih terperinci untuk isu tradisional. Seluruh kumpulan Perjanjian WTO membentuk satu paket tunggal — yaitu, negara-negara yang bergabung harus menerima atau menolak hasil dari beberapa negosiasi dalam satu paket, bukan memilih di antara mereka. Peraturan ini mempromosikan ekonomi pasar sambil memberikan toleransi terbatas untuk intervensi negara, dan sebagai hasilnya, ruang kebijakan yang tersedia untuk anggota WTO di bidang kebijakan perdagangan dan industri telah menyusut. (McCorrison & MacLaren, 2002)

Seiring dengan perluasan domain WTO dan adopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada aturan, anggota WTO mulai meminta komitmen akses tentang kepatuhan anggota baru terhadap aturan WTO, tentang pengenalan ukuran dan regulasi baru, serta tentang pelaksanaan kewajiban WTO. Akses ke organisasi tersebut menuntut tinjauan komprehensif terhadap kebijakan perdagangan negara yang akan bergabung, dan waktu yang dibutuhkan untuk negosiasi pun menjadi lebih panjang. Namun, cara untuk mengintegrasikan NMEs tidak diubah. WTO tidak membentuk komite untuk masalah ini. Tidak ada upaya kesepakatan baru yang mencoba menyediakan pendekatan terpadu untuk menampung negara-negara yang sedang reformasi (Wallis, 2010). Meskipun ada diskusi akademis tentang cara mengintegrasikan negara-negara yang sedang reformasi ke dalam organisasi perdagangan internasional pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, tidak ada tindakan yang diambil. Bahkan dengan akses negara NMEs besar seperti Cina dan Rusia, rezim ekonomi internasional tetap tidak bergerak dalam mengembangkan mekanisme baru untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi karena akses negara-negara ini (Huang, 2009).

Artinya adalah konvergensi ideologi ekonomi yang sedang berlangsung. Istilah 'konvergensi ideologi ekonomi' merujuk pada perkembangan pasca-Perang Dingin yang melihat akhir persaingan antara dua ideologi kebijakan ekonomi — ekonomi terencana dan ekonomi pasar. Pengejaran struktur ekonomi pasar di ranah domestik telah menjadi satu-satunya opsi setelah kegagalan komunisme yang mengecewakan (Ash & Holbig, 2013). Memang, tingkat intervensi negara bervariasi di antara ekonomi pasar seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Namun, mereka masih berdasarkan prinsip umum bahwa intervensi pemerintah adalah pengecualian, dan

agen utama kegiatan ekonomi adalah entitas swasta (Davis & Wilf, 2017). Demikian pula, negara-negara yang sedang reformasi mungkin mengadopsi pendekatan berbeda dari reformasi pasar dan memiliki desain keterlibatan pemerintah yang berbeda dalam struktur ekonomi baru mereka. Namun, tujuan bersama mereka adalah untuk menetapkan tatanan pasar baru berdasarkan kegiatan usaha swasta, bukan perencanaan negara (Brandt, Van Biesebroeck, Wang, & Zhang, 2017).

Karena negara-negara yang bergabung mengejar tujuan yang sama dari ekonomi pasar bebas, respons WTO terhadap aplikasi mereka untuk bergabung dengan organisasi berbeda dari era GATT. Pertimbangan utama anggota WTO sekarang bukan bagaimana mengintegrasikan negara-negara dengan fitur ekonomi terencana, tetapi bagaimana menyediakan mekanisme transisi sebelum anggota-anggota ini menjadi ekonomi pasar ala Barat. Seperti yang dicatat oleh seorang ahli, pertanyaan mendasar bukan lagi 'mengapa mereka tidak bisa lebih seperti kita?', tetapi sekarang bahwa negara-negara non-pasar telah memutuskan untuk menjadi seperti negara-negara ekonomi pasar, 'apa cara yang paling efisien, oleh karena itu cara yang paling tidak menyakitkan, untuk melakukannya?' Karena aturan WTO — yang mewakili norma rezim perdagangan multilateral — dianggap oleh negara-negara yang sedang reformasi yang bergabung sebagai panduan untuk reformasi ekonomi, negosiasi akses dirancang untuk menyediakan peta jalan bagi negara-negara ini untuk mengadopsi sistem 'kompatibel dengan WTO', bukan untuk menyediakan antarmuka dari kedua sistem tersebut. Seluruh tujuan diplomasi perdagangan telah berubah dari sarana yang sangat sempit untuk mengelola ketergantungan menjadi strategi yang lebih didorong secara politik untuk mendorong restrukturisasi domestik — yang saya sebut sebagai marketisasi (Davis & Wilf, 2017).

Akibatnya, negosiasi akses WTO yang lebih baru yang melibatkan NME tidak lagi menekankan terjemahan antara kuota impor dan konsesi tarif. Penekanannya sekarang adalah pada transformasi struktur pasar di negara-negara yang mencari akses. Ekonomi yang direncanakan secara sentral sebelumnya diwajibkan untuk memprivatisasi perusahaan dan menetapkan struktur pasar yang kompetitif. Tuntutan yang dibuat pada negara-negara seperti Cina, Bulgaria, Latvia, Estonia, Lithuania, dan negara-negara bekas Soviet lainnya difokuskan pada hak perdagangan perusahaan dan program liberalisasi (Brandt et al., 2017).

Biasanya, negara-negara yang bergabung diminta untuk menjamin hak individu dan perusahaan untuk mengimpor dan mengekspor barang. Kewajiban ini dijelaskan secara terperinci dalam laporan kelompok kerja, yang kemudian diintegrasikan ke dalam protokol akses (Qin, 2004). Sebagai contoh, laporan kelompok kerja tentang akses Latvia mencatat konfirmasi dari perwakilan Latvia bahwa "monopoli negara dalam perdagangan luar negeri telah dihapuskan dan tidak ada pembatasan atas hak individu dan perusahaan untuk mengimpor dan mengekspor barang ke wilayah bea cukai Latvia" (Allee & Scalera, 2012). Pernyataan serupa juga terdapat dalam laporan kelompok kerja Bulgaria, Estonia, dan Lituania. Negara-negara ini lebih lanjut mengkonfirmasi bahwa "individu dan perusahaan tidak dibatasi dalam kemampuan mereka untuk mengimpor atau mengekspor berdasarkan lingkup bisnis yang terdaftar", dan kriteria untuk pendaftaran perusahaan berlaku umum dan dipublikasikan dalam lembaran negara mereka (Pelc, 2011).

Selain persyaratan di atas tentang masalah hak perdagangan, negara-negara pelamar non-pasar juga diminta untuk menyediakan laporan tahunan kepada anggota WTO tentang kemajuan program privatisasi mereka. Kekhawatiran tentang kebijakan ekonomi secara keseluruhan juga



disampaikan (Ya Qin, 2003). Misalnya, dalam laporan kelompok kerjanya, Latvia menjelaskan kebijakan kontrol harga, menyediakan daftar barang di bawah kontrol harga negara, dan berkomitmen untuk menerapkan kontrol harga dengan cara yang konsisten dengan WTO serta mempertimbangkan kepentingan anggota WTO yang mengekspor. Kewajiban akses ini tidak dapat ditemukan dasarnya dalam teks perjanjian WTO. Meskipun preambule Perjanjian Marrakesh yang Mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia menyebutkan prinsip liberalisasi perdagangan, tidak ada kata-kata tentang ekonomi pasar atau privatisasi. Kewajiban akses yang melebihi persyaratan yang ada dari perjanjian WTO sering disebut sebagai kewajiban "WTO-plus" (Ya Qin, 2010). Meskipun persyaratan akses WTO-plus dianggap oleh beberapa pengamat sebagai potensi bahaya terhadap integritas 'aturan hukum WTO', pada saat yang sama 'kewajiban ekonomi pasar' ini diklaim tidak memberikan kewajiban tambahan pada negara-negara yang bergabung, karena diperlukan untuk memastikan kompatibilitas sistem negara-negara yang bergabung dengan sistem WTO (Qin, 2012).

Namun, komitmen akses ini tentang struktur pasar menggemakan seruan untuk 'komitmen akses pasar yang berarti' dalam Pertemuan Menteri WTO pertama, yang diadakan di Singapura pada tahun 1996, karena mereka dirancang untuk memastikan bahwa negara-negara yang sedang reformasi memiliki struktur ekonomi pro-pasar di area di mana produk dan jasa asing seharusnya dapat bersaing secara adil dengan saingan domestik (McCorrison & MacLaren, 2002). Secara keseluruhan, bertentangan dengan pendekatan GATT yang menyediakan antarmuka untuk meredakan kesenjangan antara pihak kontraktor ekonomi pasar dan ekonomi terencana, WTO mengambil pendekatan 'seperti kami'. Rezim WTO dalam konteks ini mewakili klub yang hanya terbuka untuk anggota yang beroperasi berdasarkan prinsip pasar. Jika suatu negara ingin bergabung dengan klub, negara tersebut harus bertransformasi untuk menjadi seperti yang ada di dalam klub. Organisasi ini dengan demikian meninggalkan identitasnya sebagai forum netral dalam hal ini. Ekonomi yang beroperasi pada dasar non-pasar tunduk pada reformasi pro-pasar yang merupakan bagian dari tiket masuk mereka ke WTO (Pelc, 2011).

Pendekatan berbeda ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan politik internasional dan rezim GATT/WTO itu sendiri. Ketika tiga negara NMEs pertama masuk ke GATT pada tahun 1960-an, fokus masih pada penghapusan pembatasan kuantitatif dan pengurangan tarif. Karena dua langkah perbatasan ini dianggap sebagai hambatan utama terhadap perdagangan bebas, wajar jika Para Pihak Kontrak ingin bertukar konsesi tarif untuk kuota impor sebagai cara untuk menjamin akses pasar. Namun, sejak Putaran Tokyo, yang dinegosiasikan antara tahun 1973 dan 1979, diskursus dalam sistem perdagangan multilateral telah bergeser ke tindakan non-tarif. Semakin banyak kebijakan domestik atau bahkan struktur pasar domestik diidentifikasi sebagai penghalang yang mengimbangi manfaat yang dibawa oleh konsesi tarif (Davis & Wilf, 2017). Putaran Uruguay tidak hanya mendirikan WTO, tetapi juga memperluas lingkup rezim perdagangan multilateral ke area yang sebelumnya tidak tercakup dan yang menetapkan aturan lebih rinci untuk area seperti anti-dumping, *safeguard*, dan perdagangan pertanian. Akses terbaru oleh negara-negara non-pasar dinegosiasikan dalam lingkungan ini. Jelas bahwa pendekatan rezim yang berfokus pada struktur ekonomi/pasar domestik yang lebih liberal mempengaruhi cara negara-negara NMEs ditempatkan dalam WTO (Robertson, 2018).

Dari perspektif negara-negara non-pasar, karena adanya konvergensi ideologi ekonomi, kewajiban bergabung dengan WTO mungkin tidak hanya dilihat sebagai kerugian. Banyak yang menyarankan bahwa pemerintah nasional menggunakan kesempatan bergabung dengan WTO untuk mendukung reformasi pasar yang memang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Pendekatan permainan dua tingkat yang dikembangkan oleh Putnam menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pengaruh domestik dan internasional saling mempengaruhi secara bersamaan. Model ini menjelaskan negosiasi internasional sebagai permainan dua tingkat yang melibatkan pemimpin politik nasional yang harus berada di papan permainan domestik dan internasional setiap saat. Di tingkat internasional, pemimpin politik nasional mungkin berusaha mendapatkan kesepakatan terbaik yang dapat diterima oleh mitra asing mereka. Namun, pada akhirnya, keputusan juga harus dapat diterima oleh konstituen domestik negosiator tersebut. Negosiasi akses WTO mungkin memainkan peran yang sama dalam mereformasi restrukturisasi domestik negara-negara. Karena internasionalisasi reformasi ekonomi dapat menciptakan lebih banyak ruang untuk tindakan politik di dalam negeri, tidak mengherankan jika komitmen pasar ini dapat diintegrasikan ke dalam protokol akses WTO tanpa terlalu banyak keberatan.

### **Diplomasi Perdagangan sebagai Strategi WTO dalam Merancang Ekonomi Global Melalui Protokol Akses dan Reformasi Pasar**

Pembahasan ini menyoroti dua fitur utama dalam pendekatan WTO terhadap reformasi negara, yaitu protokol akses yang spesifik untuk setiap negara dan kebutuhan akan reformasi pasar. Pendekatan ini menggambarkan adanya konvergensi ideologi tentang pembangunan struktur ekonomi berbasis ekonomi pasar, yang menjadi dominan dalam cara WTO berinteraksi dengan negara-negara anggotanya. Lebih dari sekadar negosiasi pasar bebas, diplomasi perdagangan dalam WTO, khususnya dalam negosiasi akses, mencakup proses paksaan untuk mendorong restrukturisasi ekonomi domestik negara calon anggota.

Konvergensi ideologi ekonomi pasca-Perang Dingin telah mendorong dunia menuju liberalisme ekonomi, dengan ekonomi terencana pusat lama yang mengadopsi reformasi pasar dan mencari keanggotaan di GATT dan WTO. Protokol akses untuk negara-negara yang melakukan reformasi membutuhkan konfirmasi tentang reformasi pro-pasar yang sedang berlangsung dan komitmen untuk melaporkan kemajuan reformasi tersebut. Ini menunjukkan pergeseran dalam rezim perdagangan multilateral yang diwakili oleh WTO, dari mengintegrasikan negara-negara dengan sistem ekonomi yang berbeda menjadi menuntut mereka untuk bertransformasi sesuai dengan prinsip ekonomi pasar.

Pendekatan ini menekankan "arah pergerakan" dari NME ke ekonomi pasar sebagai indikasi kemajuan, dengan ekonomi pasar dianggap sebagai tujuan atau objektif. Namun, ironisnya, meskipun negara-negara non-pasar yang baru bergabung telah memenuhi semua reformasi yang diwajibkan, mereka tidak secara otomatis diperlakukan sebagai ekonomi pasar dalam konteks aturan anti-dumping atau bea masuk kompensasi WTO, menunjukkan ketidaksesuaian antara kewajiban reformasi dan perlakuan dalam regulasi solusi perdagangan.

Arah pro-pasar WTO dapat diamati dengan menyoroti dua aspek dalam perlakuan terhadap negara-negara perdagangan negara. Secara institusional, situasi khusus memiliki sistem NMEs atau struktur ekonomi dalam transisi ditangani dengan protokol akses spesifik negara.

Kedua, dalam kewajiban akses substantif, kebutuhan reformasi pro-pasar adalah bukti tidak terbantahkan dari adanya arah ini.

Protokol akses mengimplikasikan toleransi sementara terhadap ekonomi terencana dalam Organisasi. Meskipun semua protokol akses WTO mengandung klausa yang menyatakan bahwa protokol akses merupakan bagian integral dari perjanjian WTO dan komitmen akses dapat ditegakkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, status hukum dari protokol akses tidak selalu setara dengan perjanjian WTO. Secara politis, fitur ekonomi terencana merupakan pengecualian yang khusus diberikan kepada negara-negara perdagangan negara dalam protokol akses. Sebagai pengecualian, fitur perdagangan negara dimaksudkan untuk dieliminasi dalam perjalanan reformasi ekonomi. Penggunaan protokol akses sebagai instrumen utama untuk mengintegrasikan NMEs menekankan arah pergerakan menuju ekonomi pasar.

Kewajiban substantif dalam protokol akses negara-negara perdagangan negara bahkan lebih jelas mengungkapkan arah yang ditetapkan menuju ekonomi pasar. Laporan periodik yang diperlukan tentang kemajuan reformasi memberikan tekanan pada negara-negara yang bergabung untuk menjaga arah mereka menuju ekonomi pasar tetap di jalur yang benar. Pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pembuatan kebijakan domestik dan mekanisme harga juga menekankan pentingnya membangun sistem domestik yang sesuai dengan WTO. Kewajiban ini tidak hanya menyatakan kekhawatiran terhadap akses pasar ke pasar domestik negara yang bergabung, tetapi juga membangun peta jalan untuk reformasi masa depan. Banyak sarjana berargumen bahwa GATT/WTO adalah forum netral untuk negara-negara dengan semua jenis struktur ekonomi, dan bahwa GATT/WTO tidak mengganggu pilihan struktur pasar anggotanya. Namun, hal ini jelas tidak berlaku untuk masalah negara-negara perdagangan negara.

Memang, negosiasi untuk bergabung dengan WTO mencakup aspek bilateral dan multilateral. Kekuatan tawar-menawar berbeda di antara NMEs yang bergabung dan oleh karena itu kemampuan mereka untuk menolak atau membatasi penerapan kewajiban WTO-plus bervariasi juga. Namun demikian, kebijakan kompetisi, kebijakan penetapan harga, privatisasi, dan laporan periodik tentang kemajuan reformasi telah menjadi fitur umum penting dalam protokol akses beberapa negara transisi. Tren harmonisasi kebijakan ekonomi domestik bertentangan dengan prinsip liberalisme. Persyaratan pada negara-negara perdagangan negara untuk memasarkan dan implikasi mengadopsi sistem regulasi administratif ala Barat membatasi pilihan kebijakan reformasi ekonomi mereka. Ruang manuver pemerintah nasional dibatasi oleh kewajiban WTO mereka.

Penerapan satu set standar untuk NMEs oleh WTO konsisten dengan interpretasi diplomasi koersif, yang merujuk pada 'penggunaan intimidasi untuk membuat orang lain mematuhi keinginan seseorang'. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana WTO 'mengimposisikan' logika aturan tunggalnya sementara partisipasi dalam organisasi ekonomi internasional sebenarnya adalah 'pilihan bebas negara', konsep 'kekuatan jaringan' Grewal (Grewal, 2003) dapat digunakan. Grewal menjelaskan bagaimana operasi dinamis globalisasi ekonomi mencerminkan semacam dominasi. Jaringan didefinisikan sebagai 'sekelompok orang yang bersatu dalam cara tertentu yang membuat mereka mampu mengenali dan bertukar satu sama lain'. Jaringan tersebut bersatu melalui 'standar', yang merupakan norma atau praktik bersama tertentu yang digunakan anggotanya untuk mendapatkan akses satu sama lain. Ketika dilihat dalam konteks WTO, standar yang dirujuk oleh Grewal sebenarnya adalah kerangka regulasi keseluruhan dari perjanjian WTO. Grewal

berargumen bahwa kekuatan jaringan berasal dari dua aspek: pertama, ketika semakin banyak orang menggunakan standar koordinasi, standar tersebut menjadi lebih berharga; dan kedua, ketika lebih banyak orang dikoordinasikan ke dalam satu jaringan, secara progresif mengeliminasi alternatif di mana pilihan bebas di antara standar dapat efektif dilakukan.

Grewal menyampaikan konsep ini pada perjanjian-perjanjian WTO. Ia berpendapat bahwa WTO memiliki kekuatan jaringan sebagai koordinator sistem perdagangan multilateral. WTO tidak hanya merupakan organisasi perdagangan bebas, tetapi juga mendukung jenis rezim perdagangan tertentu. Keinginan untuk bergabung dengan WTO berasal dari hasrat mendapatkan perdagangan yang lebih bebas dengan negara lain. Dengan dukungan dari ekonomi-ekonomi besar di dunia, WTO kini mengatur hampir seluruh perdagangan internasional. Pihak yang ingin mengakses ekonomi besar dunia bisa melakukannya melalui keanggotaan WTO, asalkan mereka mematuhi standar WTO. Namun, pembentukan regulasi WTO secara historis dirancang untuk kebutuhan perdagangan antar negara industri. Ketika negara non-pasar bergabung dengan WTO, mereka hanya bisa memilih antara standar yang telah ditetapkan atau terisolasi dari organisasi perdagangan utama. Dengan demikian, kekuatan jaringan WTO menghasilkan satu set standar minimum dominan dalam kebijakan perdagangan. Meskipun anggotanya bergabung secara sukarela, mereka juga kehilangan kemungkinan standar lain yang mungkin lebih menguntungkan bagi mereka.

Pendekatan WTO terhadap NMEs menambah klaim bahwa diplomasi paksa diterapkan dalam rezim perdagangan internasional. Berbeda dengan pendekatan antarmuka GATT, syarat marketisasi di bawah WTO menjadi satu-satunya opsi bagi negara non-pasar untuk reintegrasi ke dalam perdagangan global. Memang benar bahwa ekonomi yang direncanakan sebelumnya melakukan reformasi pasar atas inisiatif sendiri, dan upaya bergabung dengan WTO adalah bagian dari proyek mereka sendiri. Namun, persaingan Perang Dingin telah membuat sebagian besar negara ini terisolasi dari jaringan perdagangan yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa. Dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet, negara-negara ini mencoba terhubung kembali ke jaringan yang diwakili oleh GATT/WTO. Pengakuan oleh masyarakat internasional merupakan motivasi kuat dari reformasi pasar. Adopsi norma internasional adalah langkah menuju pengakuan, mengingat kekuatan jaringan WTO mengeliminasi alternatif lain untuk kerja sama ekonomi global.

## **Kesimpulan**

WTO telah mengambil pendekatan strategis dalam mengintegrasikan negara-negara dengan ekonomi non-pasar (NMEs) dengan mendorong mereka untuk mengadopsi reformasi ekonomi pro-pasar sebagai syarat keanggotaan. Proses ini menunjukkan pergeseran dari model antarmuka GATT yang lebih netral, yang memfasilitasi perbedaan sistem tanpa tekanan signifikan terhadap restrukturisasi domestik, menuju strategi marketisasi yang lebih ketat di era WTO. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan WTO untuk mendukung liberalisasi ekonomi dengan mengintegrasikan NMEs ke dalam kerangka kerja regulasi global yang lebih beragam. Melalui diplomasi perdagangan yang aktif, WTO tidak hanya membantu menyelesaikan konflik perdagangan yang muncul dari preferensi kebijakan domestik yang beragam, tetapi juga mendorong negara-negara NME untuk memodernisasi ekonomi mereka sesuai dengan prinsip pasar bebas. Ini mencakup pembentukan struktur regulasi yang mirip dengan negara-negara Barat,

yang dianggap perlu untuk partisipasi efektif dalam sistem perdagangan global. Dengan demikian, integrasi ekonomi global yang didorong oleh WTO melibatkan pemasaran yang signifikan, yang menandai sebuah pergeseran ideologis dari fungsi asli GATT.

## Referensi

- Allee, T. L., & Scalera, J. E. (2012). The Divergent Effects of Joining International Organizations: Trade Gains and the Rigors of WTO Accession. *International Organization*, 66(2), 243–276. <https://doi.org/10.1017/S0020818312000082>
- Ash, R., & Holbig, H. (2013). *China's Accession to the World Trade Organization*. (R. Ash & H. Holbig, Eds.). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203037553>
- Baetens, F. (2023). World Trade Organization Rules Before Investment Tribunals: Facilitating Cross-Fertilisation While Appreciating Particularities. *The Journal of World Investment & Trade*, 24(1), 1–36. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340277>
- Boza, S., & Fernández, F. (2016). World Trade Organization members' participation in mechanisms under the sanitary and phytosanitary agreement. *International Journal of Trade and Global Markets*, 9(3), 212. <https://doi.org/10.1504/IJTGM.2016.077850>
- Brabant, J. M. van. (1991). *The Planned Economies and International Economic Organizations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brandt, L., Van Biesebroeck, J., Wang, L., & Zhang, Y. (2017). WTO Accession and Performance of Chinese Manufacturing Firms. *American Economic Review*, 107(9), 2784–2820. <https://doi.org/10.1257/aer.20121266>
- Cowling, K., Stuart, E. A., Neff, R. A., Magraw, D., Vernick, J., & Porter, K. P. (2019). World Trade Organization membership and changes in noncommunicable disease risk factors: a comparative interrupted time-series analysis, 1980–2013. *Bulletin of the World Health Organization*, 97(2), 83-96A. <https://doi.org/10.2471/BLT.18.218057>
- Davis, C. L., & Wilf, M. (2017). Joining the Club: Accession to the GATT/WTO. *The Journal of Politics*, 79(3), 964–978. <https://doi.org/10.1086/691058>
- Dunoff, J. (1999). The death of the trade regime. *European Journal of International Law*, 10(4), 733–762. <https://doi.org/10.1093/ejil/10.4.733>
- Grewal, D. S. (2003). Network Power and Globalization. *Ethics & International Affairs*, 17(2), 89–98. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.2003.tb00441.x>
- Hopewell, K., & Margulis, M. E. (2023). World Trade Organization rules hamper public food stockholding. *Nature Food*, 4(3), 196–198. <https://doi.org/10.1038/s43016-023-00707-y>
- Howse, R. (2002). From Politics to Technocracy—and Back Again: The Fate of the Multilateral Trading Regime. *American Journal of International Law*, 96(1), 94–117. <https://doi.org/10.2307/2686127>
- Huang, C. (2009). Non-Market Economies' Accessions to the WTO: Evolution of the Approach and Implications for the Organization. *The Hague Journal of Diplomacy*, 4(1), 61–81. <https://doi.org/10.1163/187119109x394322>
- Jackson, J. H. (1989). Trade and Non-Market Economies. *International Law*, 23(4), 891–908.
- Jackson, J. H. (1990). *Restructuring the GATT System*. New Jersey: Council on Foreign Relations Press.
- Jackson, J. H. (1997). *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. Cambridge: MIT Press.
- Jackson, J. H., Davey, W., & Sykes, A. (1995). *Legal Problems of International Economic Relations: Cases, Materials and Texts on the National and International Regulation of Transnational Economic Relations*. St. Paul: West Publishing Company.

- Kostecki, M. M. (1979). *East-West Trade and the GATT System*. London: Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-03692-9>
- Lang, A. T. F. (2006). Reconstructing Embedded Liberalism: John Gerard Ruggie and Constructivist Approaches to the Study of the International Trade Regime. *Journal of International Economic Law*, 9(1), 81–116. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgi057>
- Liebman, B. H., & Tomlin, K. (2015). World Trade Organization sanctions, implementation, and retaliation. *Empirical Economics*, 48(2), 715–745. <https://doi.org/10.1007/s00181-013-0794-2>
- McCorriston, S., & MacLaren, D. (2002). State Trading, the WTO and GATT Article XVII. *The World Economy*, 25(1), 107–135. <https://doi.org/10.1111/1467-9701.00422>
- Nedumpara, J. J., & Zhou, W. (2018). *Non-market Economies in the Global Trading System*. (J. J. Nedumpara & W. Zhou, Eds.), Springer. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-1331-8\\_6](https://doi.org/10.1007/978-981-13-1331-8_6)
- Pelc, K. J. (2011). Why Do Some Countries Get Better WTO Accession Terms Than Others? *International Organization*, 65(4), 639–672. <https://doi.org/10.1017/S0020818311000257>
- Qin, J. Y. (2004). WTO Regulation of Subsidies to State-Owned Enterprises (SOEs) - A Critical Appraisal of the China Accession Protocol. *Journal of International Economic Law*, 7(4), 863–919. <https://doi.org/10.1093/jiel/7.4.863>
- Qin, J. Y. (2012). The Predicament of China's "WTO-Plus" Obligation to Eliminate Export Duties: A Commentary on the China-Raw Materials Case. *Chinese Journal of International Law*, 11(2), 237–246. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jms035>
- Robertson, H. (2018). No Sign of Landing: Airbus, Boeing, the WTO, and the Expanding Large Civil Aircraft Battle. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3114942>
- Ruggie, J. G. (1982). International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order. *International Organization*, 36(2), 379–415.
- Ruggie, J. G. (1998). What Makes the World Hang Together: Neo-Utilitarianism and the Social Constructivist Challenge. *International Organization*, 52(4), 855–885.
- Shaffer, G., & Pabian, D. (2015). European Communities—Measures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal Products. *American Journal of International Law*, 109(1), 154–161. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.109.1.0154>
- Solomon, B. D. (2023). World Trade Organization (WTO). In *Dictionary of Ecological Economics* (pp. 592–592). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788974912.W.31>
- Theodorou, P. (2017). World Trade Organisation and Stimulating Innovation: An Outline Approach Towards Growth in the Chinese Market. In *Global Opportunities for Entrepreneurial Growth: Coopetition and Knowledge Dynamics within and across Firms* (pp. 441–452). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78714-501-6201711025>
- Trujillo, E. (2015). China Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten, and Molybdenum. *American Journal of International Law*, 109(3), 616–623. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.109.3.0616>
- Wallis, J. (2010). 'Friendly islands' in an unfriendly system: Examining the process of Tonga's WTO accession. *Asia Pacific Viewpoint*, 51(3), 262–277. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2010.01430.x>
- Ya Qin, J. (2003). "WTO-Plus" Obligations and Their Implications for the World Trade Organization Legal System. *Journal of World Trade*, 37(Issue 3), 483–522. <https://doi.org/10.54648/TRAD2003025>
- Ya Qin, J. (2010). The Challenge of Interpreting 'WTO-PLUS' Provisions. *Journal of World Trade*, 44(Issue 1), 127–172. <https://doi.org/10.54648/TRAD2010004>